

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Permasalahan - permasalahan yang ada di setiap kota muncul sejalan dengan proses pertumbuhan dan perkembangan kota - kota tersebut. Proses pertumbuhan kota maupun desa tidak luput dari permasalahan - permasalahan lahan yang dihadapinya, antara lain: masalah kependudukan, ekonomi, urbanisasi, kesehatan, transportasi, dan sebagainya.

Pesatnya pertumbuhan penduduk di daerah perkotaan ini menyebabkan tingginya infrastruktur yang harus disediakan oleh pemerintah mengingat bahwa kehidupan di perkotaan tidak pernah terlepas dari sarana dan prasarana yang harus disediakan dalam mendukung mobilisasi penduduk sebagai perwujudan dari pelayanan publik yang baik. Transportasi sebagai salah satu pendukung dalam mobilitas penduduk di perkotaan memegang peranan penting dalam usaha mencapai tujuan - tujuan pengembangan dalam bidang ekonomi. Transportasi yang dimaksudkan juga terkait terhadap sistem transportasi yang ada dan perparkiran merupakan elemen penting dari sistem transportasi tersebut.

Perparkiran bukanlah suatu fenomena yang baru, perparkiran merupakan masalah yang sering dijumpai dalam sistem transportasi. Di banyak kota baik di kota - kota besar maupun kota - kota yang sedang berkembang selalu menghadapi masalah perparkiran, namun pada kenyataanya masalah parkir di Indonesia masih sangat memprihatinkan hampir semua di kota - kota besar mempunyai masalah yang sama yaitu tentang parkir yang menggunakan sebagian badan jalan yang dapat menyebabkan kemacetan dan tidak memiliki sumbangsi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 1 menyatakan bahwa parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. Ada hal yang menarik mengenai masalah

perparkiran ini, pertama; perparkiran di tepi jalan umum menjanjikan kontribusi yang cukup besar bagi daerah otonom, kedua; perparkiran di tepi jalan umum di lain pihak dapat mengganggu kelancaran lalu lintas. Selain itu masalah yang sering muncul dalam perparkiran yaitu munculnya parkir liar dan premanisme. Timbulnya parkir liar biasanya menggunakan acara-acara insidental dan tempat-tempat yang ramai pengunjung, seperti pusat perbelanjaan, tempat wisata, gedung perkantoran, hotel dan restoran maupun rumah makan.

Kota Semarang menjadi salah satu wilayah yang berkembang pesat dengan jumlah penduduk yang terus bertambah setiap tahunnya. Sejalan dengan pertumbuhan penduduk yang meningkat, jumlah kendaraan pribadi yang dimiliki juga semakin meningkat pula, sehingga mengakibatkan tingginya arus kendaraan di jalan raya dan mengakibatkan kemacetan di beberapa ruas jalan. Kondisi ini tentunya menuntut pemerintah daerah selaku pelayan publik, untuk dapat memberikan fasilitas sarana dan prasarana dalam pengaturan arus kendaraan serta memberikan jasa pelayanan parkir yang memadai bagi warga kota Semarang.

Dengan kata lain kota Semarang juga sebagai daerah dengan tingkat kepadatan arus kendaraan yang cukup tinggi sudah seharusnya menyediakan kawasan parkir khusus dan mengelola parkir di tepi jalan umum dengan baik dan benar, sehingga nantinya tidak menghambat arus lalu lintas di jalan raya. Ada beberapa kawasan yang perlu mendapatkan penataan parkir secara serius, diantaranya adalah kawasan simpang lima, kota lama, jalan pandanaran, jalan pemuda, jalansemarang – purwodadi, tempat – tempat wisata, pasar, tempat ibadah dan perkantoran dengan kondisi ruas badan jalan yang sempit serta tingkat arus kendaraan yang tinggi, dimana tidak diperkenankan untuk melakukan parkir di tepi jalan, sehingga harus diberikan area parkir secara khusus karena kawasan tersebut kerap menjadi sumber kemacetan.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : 272/HK.105/DRJD/16, tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas parkir terdapat dua jenis fasilitas parkir, yakni parkir di badan jalan (*on*

*street parking*) dan parkir di luar badan jalan (*off street parking*). Daerah - daerah yang tidak memiliki kawasan parkir secara khusus, dapat menggunakan badan jalan untuk kebutuhan parkir dengan mengikuti aturan yang berlaku dan tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas.

Namun seringkali masyarakat tidak memahami aturan - aturan dalam penggunaan parkir tepi jalan, dimana justru menggunakan badan jalan yang tidak seharusnya dipergunakan sebagai tempat parkir kendaraannya, atau memarkir kendaraan secara sembarangan. Kondisi ini tentunya dapat memperparah kemacetan di jalan raya, sehingga dibutuhkan petugas parkir yang dapat mengarahkan dan menata kendaraan agar parkir di tempat yang seharusnya secara benar dan tidak mengganggu kelancaran arus jalan raya.

Disisi lain, kebutuhan parkir kendaraan relatif tinggi yang tidak dibarengi dengan penataan kawasan parkir menjadi salah satu faktor munculnya kawasan kantong parkir ilegal yang dikelola oleh juru parkir liar. Kawasan tersebut kerap menjadi sumber kemacetan dan problematika dalam penertiban kawasan parkir, juru parkir liar terkadang sengaja memanfaatkan kondisi tersebut dengan memungut jasa parkir yang tidak dapat dipertanggung jawabkan perolehannya. Padahal dari retribusi pengelolaan dan penataan parkir tersebut dapat menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif cukup besar. Akibat dari parkir di badan jalan menyebabkan hambatan pergerakan arus lalu lintas pada ruas jalan tersebut, yang pada akhirnya terjadi penyempitan lebar jalan dan besar kemungkinan akan menurunkan kapasitas ruas, besarnya penyempitan tersebut dipengaruhi oleh volume parkir, ukuran kendaraan dan sudut parkir.

Masalah ini timbul karena Pemerintah Kota atau Pemerintah Daerah kurang memperhatikan masalah parkir padahal masalah parkir ini apabila dibiarkan terus menerus akan mengakibatkan dampak yang sangat kompleks dan sukar untuk diatasi. Sebagai organisasi pemerintah yang memiliki fungsi sebagai pelaksana urusan pemerintahan dalam prasarana dan fasilitas umum khususnya sektor lalu lintas dan perhubungan, Dinas Perhubungan memiliki peran yang sangat berat dalam melaksanakan fungsinya tersebut mengingat berbagai pelanggaran lalu lintas yang ditangani oleh Dinas Perhubungan dari

waktu ke waktu semakin meningkat.

Semakin banyaknya bentuk pelanggaran masyarakat terhadap lalu lintas membuat pekerjaan pihak Dinas Perhubungan harus diemban dengan lebih baik. Sebenarnya persoalan penegakan hukum dalam berlalu lintas bukanlah hal yang harus diemban oleh pihak Dinas Perhubungan semata melainkan masyarakat seharusnya ikut ambil bagian dalam menegakan ketertiban berlalu lintas. Tanpa adanya kerja sama dari kedua belah pihak akan sulit untuk menekan angka pelanggaran lalu lintas di tengah masyarakat.

Kegiatan parkir ilegal / parkir liar juga semakin banyak dilakukan oleh oknum - oknum yang tidak bertanggung jawab dan hanya untuk mendapatkan keuntungan diri sendiri. Selain mengganggu kelancaran arus lalu lintas, keberadaan parkir liar sebenarnya juga membuat keindahan tata kota berkurang. Hal ini dikarenakan seringnya kegiatan parkir yang dilakukan memakan badan jalan, sehingga kerapian tata kota yang diharapkan terganggu.

Oleh sebab itu perlu adanya kerjasama yang baik dan kesadaran setiap pihak diantaranya dari pihak masyarakat dan Dinas Perhubungan. Dari Penelitian ini di temukan beberapa kinerja perparkiran yang belum efektif dan maksimal dalam mengelola perparkiran Kota Semarang. Kesiapanparapelaksana tugas untuk bekerja secara cakap dan penuh tanggung jawab serta organisasi yang menjadi penyelenggara Proses Perparkiran belumlah sepenuhnya dijalankan dengan baik dan sungguh-sungguh.

Pemerintah Kota Semarang sebenarnya telah melakukan penataan dan pengelolaan kawasan parkir tepi jalan tersebut, dengan diterapkannya Peraturan Daerah yang mengatur tentang retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum melalui Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Diharapkan dengan diterapkannya Perdatersebut dapat mengoptimalkan pengelolaan parkir dan meningkatkan Pendapatan Asli Derah (PAD) yang bersumber dari retribusi parkir dan dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan penataan parkir di tepi jalan umum. Adapun instansi teknis atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ditunjuk menjadi penanggung jawab pelaksana pemungut retribusi parkir tepi jalan umum adalah

Dinas Perhubungan melalui UPTD Pengelola Parkir.

Dengan demikian peran Dinas Perhubungan khususnya unit pelaksana parkir yang mempunyai peran yang sangat penting terhadap juru parkir, yang membawa dampak negatif terhadap masyarakat dengan Berdasarkan permasalahan -permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul penelitian “**Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Parkir Liar di Kota Lama Semarang Tahun 2020**“

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka perumusan masalah yang akan dijawab melalui penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah pelaku parkir liar berpengaruh terhadap Parkir Liar di kota Lama Semarang Tahun 2020?
2. Apakah kebijakan penertiban berpengaruh terhadap Parkir Liar di kota Lama Semarang Tahun 2020?
3. Apakah Peran Dinas Perhubungan berpengaruh terhadap Parkir Liar di Kota Lama Semarang Tahun 2020?
4. Apakah secara simultan faktor pelaku parkir Liar, kebijakan penertiban, dan peran Dinas Perhubungan, berpengaruh terhadap Parkir Liar di kota Lama Semarang Tahun2020?

## **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Dalam penelitian ini, ada beberapa tujuan dan kegunaan yang disampaikan dari penelitian ini sebagai berikut:

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai melalui penyusunan skripsi ini adalah :

- a. Untuk mengetahui pelaku parkir liar berpengaruh terhadap Parkir Liar di Kota Lama Semarang Tahun 2020.
- b. Untuk mengetahui kebijakan penertibanberpengaruh terhadap Parkir Liar di kota Lama Semarang Tahun 2020 .
- c. Untuk mengetahui Peran Dinas Perhubungan berpengaruh terhadap Parkir Liar di kota Lama Semarang Tahun 2020.

- d. Untuk mengetahui secara simultan pelaku parkir liar, kebijakan penertiban, dan peran Dinas perhubungan berpengaruh terhadap Parkir Liar di kota Lama Semarang Tahun 2020.

### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

Dari Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

- a. Bagi Lembaga

Sebagai cara untuk menerapkan teori – teori yang diperoleh di bangkukuliah, menerapkan dan mengaplikasikan dengan kenyataan yang adadi lapangan untuk menambah pengalaman dan wawasan baru di bidang transportasi khususnya transportasi darat. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bagi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan permasalahan ini, serta judul penelitian ini.

- b. Bagi Pembaca

Memberikan tambahan referensi dari hasil penelitian ini sehingga dapat mengembangkan pemikiran – pemikiran logis yang nantinya berguna untuk perkembangan penelitian selanjutnya.

- c. Kegunaan Praktisi dan Pemerintah

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberi masukan yang berguna bagi instansi terkait.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, maka disusun suatu sistematika penulis yang berisi informasi mengenai materi yang dibahas dalam tiap – tiap bab, yaitu ;

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini berisikan tentang pengertian pengetahuan, budaya masyarakat, dan pemahaman pengendara, hipotesis serta kerangka pemikiran menurut penelitian terdahulu dan para ahli.

#### **BAB III: METODOLOGI PENELITIAN**

Dalam bab ini berisikan 5 (lima) sub bab yaitu tentang variabel penelitian dan definisi operasional, penentuan populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan analisis data akan dijelaskan secara rinci tentang deskripsi penelitian secara operasional.

#### **BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Di dalam bab ini, hasil dan pembahasan ini berisi tentang deskripsi obyek penelitian, analisis data, pembahasan, dan implikasi manajerial.

#### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini membahas tentang kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil analisis data, saran dapat diberikan pada pihak yang terkait atau untuk koreksi terhadap studi pengembangan selanjutnya.

#### **Daftar Pustaka**

#### **Lampiran**

